KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Mengklaim Anggaran Gedung Baru Disetujui
Tanggal : Senin, 23 Oktober 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

DPR Mengklaim Anggaran Gedung Baru Disetujui

Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan akan melakukan rapat pada hari ini.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

TEMPO/TONY HARTAWAN



Maket gedung baru DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat mengklaim pemerintah telah menyetujui anggaran pembangunan gedung baru pada tahun depan. Wakil Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah, mengatakan persetujuan tersebut diambil pada 9 Oktober lalu dalam rapat Panitia Kerja Pemerintah Pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018."Banggar hanya meneruskan dari Komisi Hukum, dan disetujui penuh oleh pemerintah sesuai dengan nota keuangan," kata Said kepada *Tempo*, kemarin.

Berbeda dengan lembaga lainnya, anggaran DPR dibahas lewat Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat Jenderal. Karena itu, pembahasan awal dilakukan di Komisi Hukum sebagai mitra kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Said adalah Ketua Panitia Kerja Pemerintah Pusat untuk RAPBN 2018. Sedangkan dalam pembahasan 9 Oktober lalu, kata Said, pemerintah diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Proyek gedung baru DPR yang ditentang oleh sejumlah kalangan mencuat lagi setelah pemerintah kembali mengalokasikan bujet dalam pagu rencana anggaran pada Juli lalu. Padahal, sebelumnya, pemerintah mencoret usul Dewan dalam pagu indikatif April 2017.

Dalam pagu anggaran terbaru, DPR mendapat alokasi anggaran Rp 5,7 triliun pada 2018. Jumlah itu naik ketimbang anggaran pada tahun ini yang hanya Rp 4,27 triliun. Sebesar Rp 601 miliar dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung baru. Berbekal dokumen Kementerian Keuangan, *Koran Tempo* edisi 31 Agustus lalu mencatat Rp 320 miliar dari dana itu digunakan untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar sisanya untuk alun-alun demokrasi. Fulus itu dirancang sebagai kucuran pertama untuk anggaran tahun jamak pembangunan kompleks parlemen empat tahun ke depan.

Selain untuk gedung, Dewan mendapatkan sejumlah tambahan fasilitas. Dana kunjungan luar negeri, misalnya, naik 70 persen dari tahun ini menjadi Rp 343,5 miliar. Alokasi dana serap aspirasi juga berubah dari Rp 15 juta per kegiatan menjadi Rp 20 juta per kegiatan, sehingga diperlukan anggaran Rp 355,6 miliar. Sejumlah kalangan mempersoalkan tambahan anggaran untuk DPR ini lantaran kinerja wakil rakyat, terutama dalam program legislasi, terus merosot.

Menurut Said, pada siang hari ini Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan akan kembali bertemu dalam rapat kerja untuk menuntaskan seluruh komponen dalam RAPBN 2018. "Rapat Badan Anggaran ini tidak akan mengubah kesepakatan dalam panja sebelumnya," ujarnya.

Anggota Badan Anggaran, Johnny Gerard Plate, mengutarakan hal serupa. Pemerintah, kata dia, menyetujui anggaran kompleks parlemen karena ruang fiskal yang masih mencukupi. Kendati masih ada kebijakan moratorium pembangunan gedung pemerintahan, Johnny mengatakan alokasi anggaran gedung pada tahun depan hanya untuk membayar konsultan dan desain."Ini belanja modal karena masuk aset negara," ujarnya.

Menurut Johnny, pembangunan gedung kelak akan dilakukan lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Agar tidak jadi bancakan proyek," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu.

Adapun Askolani enggan menanggapi klaim Dewan tentang persetujuan pemerintah dalam anggaran gedung baru pada 2018. Dia hanya menyatakan tak ada tambahan anggaran untuk DPR dalam rapat Panitia Kerja Badan Anggaran. "Detail belanja silakan ditanyakan ke Sekretariat Jenderal DPR," ujar dia lewat pesan pendek, kemarin. ●